

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PENDISTRIBUSIAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI
KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**

Nur Aliza¹, Irwan², Muhammad Rusdi³, Muh. Tamrin⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Email Korespondensi: alizanr22@gmail.com

Email: irwanirwan41083@gmail.com; rusdi.ogy@gmail.com;

tamrinmuhammad4@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the policy is implemented in the distribution of the family hope program for the empowerment of poor communities in Duampanua Subdistrict, Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data was obtained by conducting more in-depth observations and interviews with the sub-district head, social assistance assistants, and beneficiary families. Then the data obtained from the interview results was processed using the Nvivo 12 Plus application. The research results show that the implementation of policies in the distribution of the Hope Family program has been realized, but in terms of target accuracy, this program is considered to be less effective. The factors that hinder the distribution of this program are external factors and internal factors.

Keywords: Policy implementation, Distribution, Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pada pendistribusian program keluarga harapan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Duampanua Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara yang lebih mendalam kepada Bapak Kepala Kelurahan, pendamping Sosial bantuan, serta keluarga penerima manfaat. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemtasi kebijakan pada pendistribusian program keluarga harapan sudah terealisasi namun dari segi ketepatan sasaran pada program ini dinilai masih kurang efektif. Adapun faktor yang menghambat pendistribusian program ini yaitu faktor eksternal dan faktor internal

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pendistribusian, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, setiap provinsi dan setiap daerah. Kemiskinan merupakan akibat dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi material, ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sejahtera namun ketimpangan masih terlihat jelas. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi menimbulkan banyak permasalahan dan komplikasi di berbagai aspek kehidupan. Penyebab utama kemiskinan adalah tingginya angka pengangguran, buruknya kualitas sumber daya manusia, semakin terbatasnya kesempatan kerja dan banyaknya penduduk usia kerja. Meningkatnya angka kelahiran di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan akibat bertambahnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang saat ini melanda Indonesia adalah individu, kelompok, dan keluarga tidak dapat mencapai taraf hidup minimum. Misalnya rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Negara Indonesia bertanggung

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



jawab terhadap kemiskinan yang diatur dalam UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Yang Buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. komunitas organisasi. Penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengembangkan kapasitas dasar dan kewirausahaan, jaminan dan perlindungan sosial untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dan/atau koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ketika negara mempunyai kewajiban. (Amalia Yunia Rahmawati, 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang memadukan nilai-nilai masyarakat untuk membangun model pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan (dengan partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan yang berpusat pada masyarakat) (Chamber, 1995). Lebih lanjut Kadin menjelaskan, konsep pembangunan tersebut menggunakan model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mencari alternatif solusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang banyak diperdebatkan dikalangan masyarakat karena berkaitan dengan kemajuan dan perubahan negara ini kedepannya, apalagi jika dikaitkan dengan rendahnya keterampilan masyarakat, hal ini justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. (Noor, 2011).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perogram Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini dijalankan sebagai amanah pelaksanaan dari undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat dan Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Keluarga Harapan merupakan program jaminan sosial yang unik karena di satu sisi Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang ditujukan untuk mempertahankan kehidupan guna memenuhi kebutuhan dasar khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, namun di sisi lain adalah Keluarga Harapan. Program juga bernuansa pemberdayaan yaitu penguatan rumah tangga. masyarakat miskin untuk dapat keluar dari kemiskinan melalui peningkatan kesehatan dan mendorong anak untuk bersekolah. Sasaran Program Keluarga Harapan adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang terdaftar dalam informasi program terpadu penanganan fakir miskin yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan membantu keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, mengakses layanan kesehatan (faskes) dan pendidikan (fasdik) lain yang tersedia di wilayahnya. Manfaat Program Keluarga Harapan juga mulai diperluas kepada penyandang disabilitas dan lansia dengan tetap menjaga tingkat perlindungan sosial yang disyaratkan oleh konstitusi. Dengan program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk mengakses dan menggunakan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan, termasuk pekerjaan tetap. dan untuk secara teratur mengakses program perlindungan sosial pelengkap lainnya. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menjadi hub pengentasan kemiskinan dan center of excellence yang mempertemukan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 27 Oktober 2023 penyelenggaraan implementasi program keluarga harapan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan program ini dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hasil observasi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik karena berhasil mengurangi beban pengeluaran serta mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah penerima manfaat secara keseluruhan adalah 109 kepala keluarga dengan pembagian 5 orang laki-laki dan 104 perempuan yang terdaftar. Program keluarga harapan ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat Program Keluarga Harapan dengan keadaan ekonomi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



masyarakat, sehingga hal tersebut tidak tepat sasaran. Berdasarkan dari hal tersebut peneliti tertarik untuk untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan pada pendistribusian Program Keluarga Harapan di Kelurahan Dauampanua

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu aktualisasi. D, Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang mempunyai berbagai sudut pandang yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk menguraikan secara pasti batasan-batasannya. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian implementasi dirumuskan secara singkat, dimana “*toimplement*” berarti “memberikan maksud untuk melaksanakan (*to supply to do Something*); memberikan *grounding impact*” (menyebabkan dampak yang membumi). dampak/akibat sesuatu). Beranjak dari rumusan pelaksanaan, kita dapat memperoleh gambaran bahwa “melaksanakan (melaksanakan) berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas (misal: ya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya, dan sebagainya) sehingga kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. (Mustanir & Darmiah, 2016) Implementasi dalam arti harfiah adalah penyelenggaraan. Agar lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan suatu rencana atau program. (Marwah et al., 2019).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses menjadikan sesuatu menjadi formal agar dapat dilaksanakan di lapangan oleh para aktor sehingga membuahkan hasil. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah, dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Amaludin et al., 2016). Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (konteks aktual). Variabel-variabel tersebut meliputi: sejauh mana manfaat yang diperoleh kelompok sasaran dinyatakan dalam teks kebijakan, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, tingkat perubahan kebijakan yang diinginkan, apakah kebijakan tersebut ditransformasikan secara lokal atau tidak. Yang terbaik adalah jika kebijakan tersebut menjelaskan implementasinya secara rinci dan program tersebut didukung oleh sumber daya yang sesuai. Sementara itu, Wibawa mengatakan Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah ketika kebijakan ditransformasikan, maka implementasi dapat tercapai. Keberhasilan ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan tersebut. Isi polis antara lain: Manfaat yang diatur dalam polis.

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu menyampaikan yang berarti menyalurkan. Dari segi pendistribusian, mendistribusikan berarti menyalurkan, memindahkan atau penyerahan barang terhadap seseorang. Dari segi bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris dispersal yang artinya pendistribusian dan pendistribusian, yaitu mendistribusikan, membagi atau mengirimkan barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyerahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna. Distribusi barang dan jasa kepada konsumen serta penggunaannya mempunyai beberapa peranan penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. (Irmayanti, 2018). Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu transmisi yang berarti saluran atau saluran. Dari segi distribusi, distribusi berarti menyalurkan, memindahkan, atau mengantarkan barang ke banyak orang atau lokasi. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris dispersal yang berarti menyebarkan dan mendistribusikan, yaitu menyalurkan, membagi atau mengirimkan barang dan jasa kepada banyak orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyerahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna. Distribusi barang dan jasa kepada konsumen serta penggunaannya mempunyai beberapa peranan penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.

Distribusi adalah proses penyediaan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna pada saat dan dimana barang atau jasa tersebut dibutuhkan. Proses distribusi pada hakikatnya menciptakan manfaat (utilitas) ditinjau dari waktu dan tempat. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait yang terlibat dalam penyediaan barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam mendistribusikan produk, banyak aspek yang perlu diperhatikan seperti fasilitas, transportasi, ketersediaan dan informasi kontak pihak terkait. Oleh karena itu, pengendalian yang

cermat harus dilakukan untuk memastikan seluruh proses distribusi tidak mengganggu proses terkait. Proses distribusi yang tidak efektif akan mempengaruhi kualitas produk sampai ke konsumen. (Karundeng et al., 2018). Faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor internal yang menghambat atau mempengaruhi pendistribusian di Kelurahan Duampanu terdiri dari faktor dari masyarakat itu sendiri, yaitu: rendahnya tingkat pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi kendala atau mempengaruhi kelancaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Faktor Eksternal Faktor yang menghambat atau mempengaruhi pendistribusian di Kelurahan Duampanua terdiri dari: melemahnya pengawasan pemerintah untuk mengendalikan pelaksanaan tersebut, kurangnya sosialisasi mengenai program, tidak ada pendaftaran ulang oleh pemerintah dan d. faktor di luar kemampuan aparat krlurahan. Hal ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk benar-benar diperhatikan dan ditonjolkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

Pemberdayaan. masyarakat adalah upaya untuk masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari luar, untuk meningkatkan taraf hidup berdasarkan sumber daya yang dimiliki masyarakat, melalui upaya optimalisasi sumber daya dan peningkatan kedudukan. negosiasi Anda. Dengan kata lain, pemberdayaan harus ditempatkan sesuai dengan kekuatan masyarakat sebagai modal utama dan menghindari “teknik” eksternal yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat menurut Slamet (2000) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang bersifat konsultatif yang mana Mardikanto (2003) mendefinisikannya sebagai: Suatu proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat kapasitas masyarakat melalui pembelajaran partisipatif dan proses kolaboratif, sehingga perilaku masyarakat dapat terwujud. perubahan terjadi. tiba. tiba. antara seluruh pemangku kepentingan (individu, kelompok, organisasi) yang terlibat dalam proses pembangunan untuk mencapai kehidupan yang semakin otonom, mandiri dan partisipatif serta peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.(Mustanir et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya di perdesaan, hendaknya dipahami sebagai upaya penyediaan ruang, fasilitas umum, dan kesempatan yang kondusif bagi pembangunan kemampuan kelompok miskin untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa mengabaikan atau mengabaikan permasalahan tersebut. jatuh ke dalam keadaan ketergantungan.

Menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin itu sendiri. Pemberdayaan selalu mengacu pada kelompok masyarakat yang berada pada tingkat paling bawah. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan upaya untuk menemukan dan membangkitkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat memanfaatkan potensi tersebut bagi dirinya dan lingkungannya. Sekalipun manusia mempunyai potensi, namun terkadang potensi itu muncul dengan sendirinya, dan terkadang ketika potensi itu muncul perlu ditransfer. menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memperoleh hak agar suaranya didengar untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang dapat memotivasi seseorang untuk menggunakan keterampilannya di tempat kerja guna meningkatkan kinerjanya dan kinerja seluruh karyawan organisasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah tentang implementasi kebijakan pada pendistribusian Program Keluarga Harapan. Iga Atriani (2002) fokus pada Pendiatribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif distribusi islam (studi kasus RW 09 Kelurahan Kandang Kampung Melayu Kota Bengkulu). Asriani (2002) Implementasi peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2019 terhadap pendistribusian bantuan sosial program kartu keluarga sejahtera di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Prisca lucya (2020) Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Agnes paradin as (2019) Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

METODE

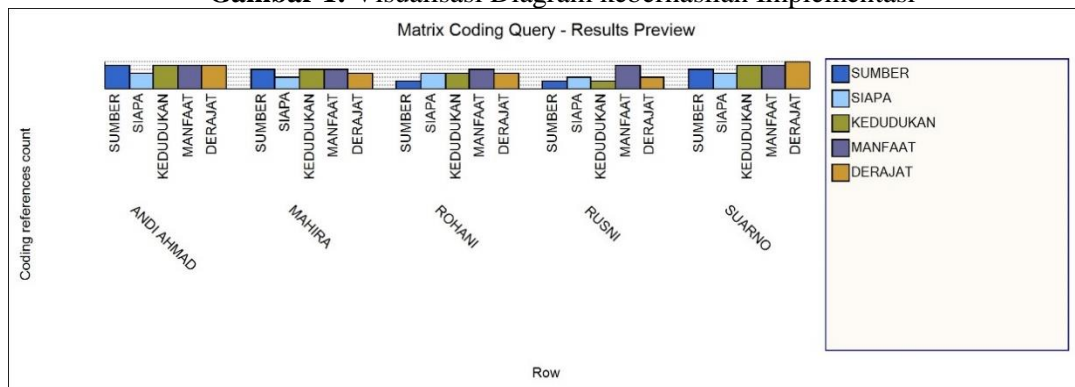
Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yaitu 5 orang. Penetapan informan pada penelitian ini adalah purposive sampling dimana harus di sesuaikan tujuan penelitan berdasarkan kategori partisipan yang sesuai dengan yang diinginkan peneliti untuk kepentingan penelitian dengan menggunakan purposif sampling (Sugiyono, 2013) yang dianggapnya mengetahui dan memahami fokus terkait fenomena yang diteliti adapun kriteria yang dimaksudkan ialah pemerintah setempat, pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara serta observasi sedangkan data sekunder dengan Pengambilan data dengan menggunakan studi dokumen. Dan data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus

PEMBAHASAN

Hasil Implementasi Kebijakan

Hasil analisis dari implementasi kebijakan terlihat jelas bahwa jenis manfaat yang dihasilkan menjadi faktor paling dominan dari informan dalam implementasi kebijakan pada pendistribusian program keluarga harapan. Derajat perubahan yang diinginkan menempati posisi penting berikutnya. Kedudukan pembuat kebijakan juga menjadi faktor signifikan, diikuti oleh sumber daya yang dihasilkan. Indikator yang paling rendah adalah siapa pelaksana program.

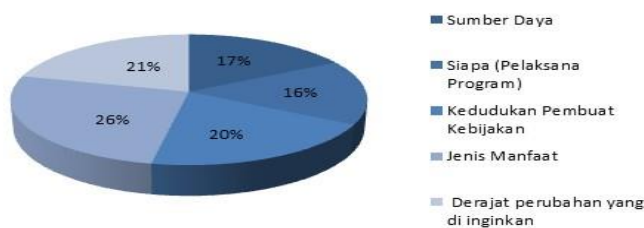
Gambar 1: Visualisasi Diagram keberhasilan Implementasi



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 20

Secara umum indikator implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pendistribusian Program Keluarga Harapan ini lebih kepada manfaat yang dihasilkan dari program ini dan cenderung tidak memperhatikan kepada siapa pelaksana program. Hal ini menunjukkan bahwa indikator siapa pelaksana program cenderung memiliki dampak yang lebih kecil dalam pengimplementasian kebijakan.

Gambar 2: Diagram Validasi Indikator Implementasi



Sumber: Olahan Penulis (2024)

Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Sajian hasil penelitian boleh dilengkapi dengan tabel (tanpa outside border) atau bagan/ gambar dengan penulisan di posisi tengah, dengan spasi 1, font 12, dan merujuk pada equation/ symbol. Jenis manfaat yang dihasilkan ialah sebuah bentuk manfaat yang diperoleh dalam hal tertentu seperti sebuah kebijakan terkait pendistribusian yaitu dengan pemeratakan pembagian bantuan sosial bagi seluruh masyarakat serta memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat kurang mampu agar memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan tunai kepada keluarga miskin.

Berikut beberapa jenis manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan program bantuan PKH:

- a. Pengentasan Kemiskinan: Bantuan langsung tunai membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.
- b. Peningkatan Akses terhadap Pendidikan: PKH memberikan syarat bagi anak dari keluarga untuk menerima bantuan pendidikan. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.
- c. Peningkatan Kesehatan: Program ini juga menjamin pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan ibu dan anak.
- d. Pemberdayaan Ekonomi: Dengan mengurangi beban ekonomi, keluarga penerima bantuan mempunyai peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha mikro atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- e. Penguatan Peran Sosial: PKH mendorong keluarga miskin untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sehingga meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas dalam masyarakat.
- f. Mengurangi Beban Keuangan: Bantuan tunai dari PKH membantu keluarga miskin mengurangi beban utang dan kewajiban keuangan lainnya, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup. Implementasi program PKH telah memberikan dampak luas tidak hanya pada peningkatan perekonomian keluarga miskin, namun juga pada aspek sosial dan kesehatan masyarakat.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Derajat perubahan yang dimaksud ialah merujuk pada sejauh mana perubahan yang dirasakan setelah tergolong dalam kategori penerima manfaat seperti perubahan ekonomi dengan adanya peningkatan terhadap pendapatan keluarga sehingga hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar yang lebih baik. Perubahan sosial dengan adanya peningkatan pada akses pendidikan maupun kesehatan, perubahan kesejahteraan selanjutnya yaitu pemberdayaan dan partisipasi dengan peningkatan partisipasi sosial kepada keluarga penerima manfaat agar lebih aktif mengikuti kegiatan sosial dari segi pemberdayaan adanya inisiatif untuk membuat usaha kecil untuk peningkatan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan.

1. Kedudukan pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan mengacu pada individu atau badan yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada organisasi, pemerintahan, atau lembaga, sering kali menempati posisi puncak dengan otoritas tertinggi dalam menetapkan arah dan kebijakan yang akan diterapkan.

2. Siapa (Pelaksana program)

Pelaksana program dalam implementasi adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan. Fokusnya adalah pada sikap atau kecenderungan pelaksana yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, seperti distribusi bantuan sosial. Jika mereka memiliki sikap positif, kebijakan tersebut cenderung dijalankan dengan efektif. Sebaliknya, jika sikap mereka tidak mendukung, pelaksanaan program dapat menjadi kurang efektif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



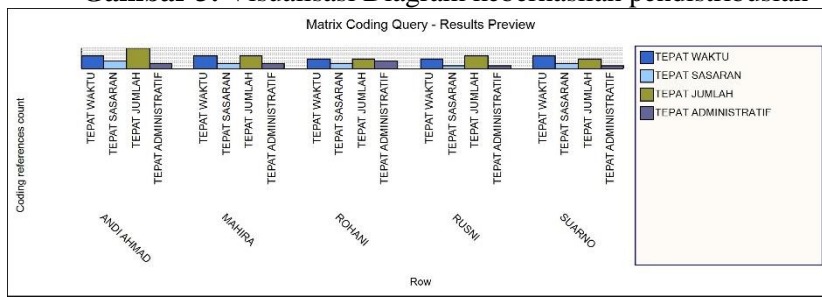
3. Sumber daya yang dihasilkan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi. Beberapa tahapan dalam proses ini memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat sesuai pekerjaan yang ditentukan oleh kebijakan yang tidak dipengaruhi faktor politik. Namun, jika kapasitas sumber daya minim, sulit untuk mengharapkan efektivitas kebijakan publik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga penting. Ketika sumber daya manusia yang kompeten tersedia, masalah bisa muncul dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal yang sama berlaku untuk sumber daya waktu; jika banyak sumber daya manusia bekerja dengan baik dan menghimpun dana, tetapi waktu terbatas, kebijakan publik bisa gagal.

Hasil Keberhasilan Pendistribusian

Untuk mengetahui keberhasilan pendistribusian dapat dilihat dari indikator menurut Pedum Rastra (Masta,2016:23) yang mengungkapkan empat indikator yang merupakan indikator keberhasilan pendistribusian program keluarga harapan di Kelurahan Duampanua yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi

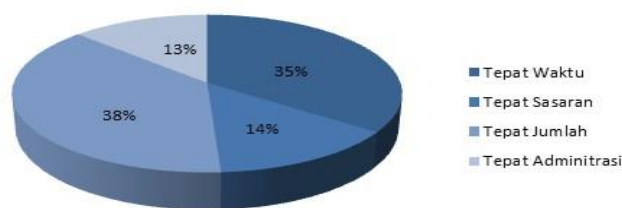
Gambar 3: Visualisasi Diagram keberhasilan pendistribusian



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator tepat jumlah menjadi indikator yang paling dominan dalam keberhasilan pendistribusian bantuan. Kemudian diikuti oleh keakuratan indikator tepat waktu tetapi dalam hal keberhasilan dalam mencapai ketepatan sasaran dan keakuratan administrasi tergolong masih rendah. Dapat disimpulkan bahwa tepat sasaran dan tepat administrasi menjadi hal yang penting dalam mencapai keberhasilan pendistribusian.

Gambar 4: Diagram Validasi Indikator Keberhasilan pendistribusian



Sumber: Olahan Penulis (2024)

1. Tepat sasaran

Tepat Sasaran adalah keadaan dimana suatu program atau kebijakan sampai pada kelompok atau individu yang dituju sebagai penerima manfaat. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial misalnya, tepat sasaran berarti bantuan tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien, serta memaksimalkan dampak positif program. Penetapan target juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program atau kebijakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang dilaksanakan. Ketika masyarakat melihat bantuan atau intervensi pemerintah tepat sasaran, mereka cenderung mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut.

Selain itu, penetapan sasaran yang tepat membantu mengurangi potensi ketidakadilan dan kesalahan dalam pendistribusian sumber daya, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau ketidakpuasan di antara kelompok masyarakat. Dengan memastikan program atau kebijakan tepat sasaran, pemerintah dan organisasi juga dapat lebih mudah memantau dan menjaga efektivitas dan dampak program. Informasi dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan yang tepat sasaran dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program di masa yang akan datang, sehingga program dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Selain itu, sasaran yang tepat memastikan bahwa dana dan upaya yang telah dicurahkan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan, menghindari pemborosan dan meminimalkan kesalahan alokasi. Oleh karena itu, program yang tepat sasaran tidak hanya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, namun juga membangun landasan kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya masyarakat, yang sangat penting bagi keinginan dan keberhasilan program dalam jangka panjang.

2. Tepat jumlah

Jumlah bantuan yang tepat adalah suatu kondisi dimana sumber daya yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditentukan. Dalam konteks penyaluran program, seperti bansos, jumlah yang tepat berarti setiap penerima manfaat menerima bantuan dalam jumlah yang memenuhi standar atau kriteria yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam penyaluran, sehingga setiap penerima manfaat mendapatkan porsi yang adil dan sesuai kebutuhannya. Dengan cara ini, sumber daya dapat digunakan secara efisien dan sempurna, meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa bantuan mencapai dampak maksimal. Selain itu, hal ini juga turut menjaga kepercayaan dan akuntabilitas program masyarakat, karena menunjukkan bahwa penyaluran dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Selain itu, memastikan jumlah penyaluran bantuan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program dan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

3. Tepat waktu

Ketepatan waktu adalah suatu keadaan dimana suatu kegiatan, program atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, tepat waktu berarti bantuan diberikan kepada penerima manfaat tepat waktu, tanpa penundaan yang tidak perlu. Menunjuk tepat waktu adalah penting karena:

- Kebutuhan Mendesak:** Banyak penerima manfaat, seperti mereka yang berada dalam situasi darurat atau kesulitan ekonomi, sangat bergantung pada bantuan yang tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Efisiensi Operasional:** Pelaksanaan program sesuai jadwal menunjukkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional program secara keseluruhan.
- Kepercayaan Masyarakat:** Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program atau kebijakan yang dilaksanakan, karena menunjukkan komitmen dan profesionalisme dalam pelaksanaannya.
- Pengurangan Risiko:** Ketepatan waktu mengurangi risiko terjadinya atau keterlambatan yang dapat menghambat proses distribusi dan menimbulkan masalah logistik lebih lanjut.
- Program Keberlanjutan:** Program yang dilaksanakan tepat waktu lebih mudah untuk dievaluasi dan ditingkatkan, karena informasi dan umpan balik dapat dikumpulkan dan dianalisis sesuai jadwal, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian yang cepat dan efektif. Dengan memastikan waktunya tepat, program atau kebijakan dapat mencapai tujuan dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan penerima manfaat, dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap masyarakat.

4. Tepat administrasi

Administrasi yang baik adalah keadaan dimana seluruh prosedur, dokumentasi dan proses administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu program atau kebijakan dilaksanakan dengan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



benar, akurat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyaluran bansos, administrasi yang baik berarti setiap tahapan proses penyaluran mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pelaporan akhir—dilakukan secara cermat dan berkala. Keberhasilan dalam administrasi yang tepat penting karena beberapa alasan: Transparansi dan Akuntabilitas yaitu administrasi yang tepat memastikan bahwa setiap aspek program didokumentasikan dengan baik, memfasilitasi pemantauan, peninjauan, dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua adalah Penghindaran Penipuan, Prosedur administratif yang ketat membantu mencegah pencemaran dan sumber daya, memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya Efisiensi Operasional, Administrasi yang baik meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kesalahan dan duplikasi proses, serta memastikan bahwa seluruh tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pada Pendistribusian Program Keluarga Harapan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kelurahan Duampanua dinilai masih kurang efektif dikarenakan data keluarga penerima manfaat masih menggunakan data terdahulu yang belum terupdate sehingga beberapa dari keluarga penerima manfaat yang sudah tidak layak menerima masih banyak yang menerima. Pendataan ulang perlu ditingkatkan untuk memvalidasi keadaan ekonomi setiap keluarga penerima manfaat. Adapun faktor yang menghambat pendistribusian Program Keluarga Harapan ini adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya meliputi adanya kecemburuan sosial yang terjadi pada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu tetapi tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat hal ini disebabkan oleh rendahnya pengaduan masyarakat sedangkan faktor eksternalnya adalah tidak adanya pendataan ulang terkait kondisi ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Amalia Yunia Rahmawati. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam penanggulangan kemiskinan di desa Ngagel kecamatan Dukuhești Kabupaten Pati Tahun 2021*. 20(July), 1–23.
- Amaludin, Almutahar, H., & Isdairi. (2016). Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera Pada Masyarakat Drsa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 1–15.
- Irmayanti, I. (2018). *Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus masyarakat Desa Tinggiame Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*. 1–71.
- Karundeng, T., Mandey, S. L., & Sumarauw, J. S. . (2018). *Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di CV Karya Abadi, Manado) Analysis of Timber Distribution Channels*. 6(3), 1748–1757.
- Marwah, M., Erfina, E., & Hamid, H. (2019). Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(2), 31–39. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i2.359>
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Mustanir, A., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Entrepreneurship Community Empowerment. *Jurnal, February*, 1–14. https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan RD*. Alfabeta.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

